



Analisis Sistem Pengendalian Intern Dinas Sosial Kabupaten Labuhan Batu Bara

Rizki Kartika Yani Lubis¹, Junita Putri Rajana Harahap^{2*}

^{1,2} Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Indonesia

rizkiikartika56@gmail.com¹, junitaputrirajanaharahap@umnaw.ac.id^{2*}

Alamat Kampus: Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20147

Korespondensi penulis: junitaputrirajanaharahap@umnaw.ac.id

Abstract : *Management of social funds is an integral part of the government's efforts to maintain community welfare. These social funds are the main instrument in overcoming social inequality, protecting vulnerable individuals and families, and ensuring that their basic rights are fulfilled. The aim of this research is to analyze the Internal Control System of the Labuhan Batu Bara Regency Social Service. This research uses qualitative research methods. The research method used is in-depth interviews with research subjects, observation and documentation. Based on the research results, the social assistance internal control system in North Labuhan Batu Regency is designed to ensure that aid distribution is carried out effectively, on target and in accordance with applicable policies. This system includes several important components, starting with administrative controls that involve creating and implementing clear policies and procedures for the management and distribution of aid. Based on the research that has been conducted, it can be concluded that the internal control system for Social Assistance in North Labuhan Batu Regency is designed to ensure that the implementation of assistance is carried out effectively, accurately and in accordance with applicable policies.*

Keywords: *System, Control, Internal, Social Services*

Abstrak. Pengelolaan dana sosial merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Dana sosial ini menjadi instrumen utama dalam mengatasi ketimpangan sosial, melindungi individu dan keluarga yang rentan, serta memastikan bahwa hak-hak dasar mereka terpenuhi. Tujuan penelitian ini ada untuk menentehai Analisis Sistem Pengendalian Intern Dinas Sosial Kabupaten Labuhan Batu Bara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara mendalam (indepth interview) pada subyek penelitian, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Sistem pengendalian intern Bantuan Sosial di Kabupaten Labuhan Batu Utara dirancang untuk memastikan penyaluran bantuan dilakukan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Sistem ini mencakup beberapa komponen penting, dimulai dengan pengendalian administratif yang melibatkan pembuatan dan penerapan kebijakan serta prosedur yang jelas untuk pengelolaan dan penyaluran bantuan. Berdasarkan penelitian yang telah dilkauan maka dapat di simpulkan Sistem pengendalian intern Bantuan Sosial di Kabupaten Labuhan Batu Utara dirancang untuk memastikan pelaksanaan bantuan dilakukan dengan efektif, akurat, dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Kata Kunci : Sistem, Pengendalian, Intern, Dinas Sosial

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan dana sosial merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Dana sosial ini menjadi instrumen utama dalam mengatasi ketimpangan sosial, melindungi individu dan keluarga yang rentan, serta memastikan bahwa hak-hak dasar mereka terpenuhi. Di tingkat lokal, Dinas Sosial memiliki peran sentral dalam pengelolaan dana sosial, bertanggung jawab atas penyaluran bantuan kepada yang membutuhkan serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan efektif dan efisien.

Kabupaten Labuhanbatu Utara, salah satu kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia, tidak terkecuali dalam hal pengelolaan dana sosial. Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki tanggung jawab besar untuk menangani berbagai program bantuan sosial, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Bantuan Sosial Tunai (BST). Tujuan dari program-program ini adalah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan.

Surat Keputusan Direktur Jendral Nomor 22/6/SK/HK.02.02/6/2020 tentang perubahan atas keputusan Direktur Jendral Nomor 18/6/SK/HK.02.02.4/2020 Tentang petunjuk teknis penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan Covid19 mengubah besaran nilai bantuan sosial setiap bulannya dan jangka waktu pemberian bantuan sosial tunai sebagai mana yang telah di tetapkan sebelumnya dalam surat keputusan Direktur Jendral Nomor 18/6/SK/HK.02.02.4/2020. Bantuan Sosial Tunai yang awalnya di berikan kepada KPM dalam periode bulan April – Juni 2020 dengan jumlah Rp. 600,000 per keluarga kemudian berubah menjadi pemberian bantuan sosial tunai dilaksanakan seja Bulan APRIL 2020 – Desember 2020 yang terdiri tahap I – IX. Demikian halnya dengan Besaran Nilai yang diberikan kepada KPM. Dimana Pemberian Bantuan Sosoal Tunai Sejumlah Rp. 600,000; perkeluarga untuk tahap I – III yakni Bulan April – Juni 2020 , dan sejumlah Rp. 300,000; perkeluarga untuk tahap IV-IX (Bulan Juni-Desember 2020).

Namun, fakta dilapangan seringkali menyaksikan kasus-kasus penyalahgunaan dana sosial atau ketidakpastian dalam alokasi dan penyaluran bantuan. Hal ini menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan di antara masyarakat terhadap efektivitas dan keadilan dari program-program bantuan sosial tersebut. Oleh karena itu, evaluasi mendalam terhadap sistem pengendalian intern Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Berikut dapat dilihat pada tabel Penerima Bantuan Dinas Sosial Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun 2022-2023

Tabel 1. Penerima Bantuan Dinas Sosial Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun 2022-2023

No	Nama Penerima	Jenis Bantuan	Jumlah Bantuan	Tahun
1	Ahmad Setiawan	Bantuan Sembako	Rp 300.000	2022
2	Budi Santoso	Bantuan Pendidikan	Rp 1.000.000	2022
3	Siti Nurhaliza	Bantuan Kesehatan	Rp 500.000	2022
4	Dedi Surya	Bantuan Sembako	Rp 300.000	2022
5	Evi Susanti	Bantuan Pendidikan	Rp 1.000.000	2022
6	Farhan Maulana	Bantuan Kesehatan	Rp 500.000	2022
7	Gina Pratiwi	Bantuan Sembako	Rp 300.000	2023

8	Hadi Saputra	Bantuan Pendidikan	Rp 1.000.000	2023
9	Ida Farida	Bantuan Kesehatan	Rp 500.000	2023
10	Joko Widodo	Bantuan Sembako	Rp 300.000	2023
11	Kiki Amalia	Bantuan Pendidikan	Rp 1.000.000	2023
12	Lala Wulandari	Bantuan Kesehatan	Rp 500.000	2023

Sumber Peneliti 2024

Pengelolaan dana sosial bukanlah tanggung jawab yang hanya dapat diemban oleh Dinas Sosial semata. Kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil juga menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pengelolaan dana sosial yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan kolaborasi yang erat, kita dapat memastikan bahwa dana sosial benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Evaluasi terhadap sistem pengendalian intern Dinas Sosial merupakan langkah krusial dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan dana sosial. Kabupaten Labuhanbatu Utara ini memiliki karakteristik dan dinamika sendiri yang perlu dipahami secara mendalam dalam proses evaluasi ini. Berbagai aspek seperti kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kebijakan dan regulasi yang berlaku, serta infrastruktur dan kapasitas institusi perlu diperhitungkan secara cermat. Tantangan pengelolaan dana sosial di Kabupaten Labuhanbatu Utara dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti perubahan kondisi ekonomi global, perubahan kebijakan pemerintah pusat, dan adanya bencana alam. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern yang diterapkan harus mampu bersifat dinamis dan responsif terhadap berbagai perubahan tersebut.

Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat setempat juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana sosial. Masyarakat yang terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan dana sosial akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan lokal dan dapat memberikan masukan yang berharga dalam perencanaan dan implementasi program-program bantuan sosial.

Dengan demikian, pengelolaan dana sosial di Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat menjadi lebih responsif, efisien, dan inklusif, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dengan memperkuat sistem pengendalian intern dan memastikan kolaborasi yang erat antar semua pemangku kepentingan, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan sejahtera bagi semua warganya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dan fenomena yang terjadi pada lingkungan perusahaan, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Analisis Sistem Pengendalian Intern Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam

Menghadapi Tantangan Pengelolaan Dana Sosial”.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Labuhanbatu Utara?
- b. Bagaimana sistem pengendalian intern Bantuan Sosial di Kabupaten Labuhanbatu Utara?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara mendalam (indepth interview) pada subyek penelitian, observasi dan dokumentasi. Adapun tujuan penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana Analisis Evaluasi Sistem pengendalian Intern Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Menghadapi Tantangan Pengelolaan Dana Sosial. Subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling dengan validitas data menggunakan teknik triangulasi. Adapun lokasi penelitian yaitu di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara. Teknik analisa data yang dipakai/digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Deskriptif. Data, yang terkumpul akan dianalisis sesuai kriteria dan hal-hal yang diperlukan dalam suatu pendataan. Penyajian dan pemilihan adalah mengelompokkan data-data sesuai kriteria masing-masing dan dibutuhkan dalam penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumen untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian tentang Sistem pengendalian intern bantuan sosial tunai di Kabupaten Labuhan Batu Bara, format penulis hasil penelitian merujuk pada rumusan masala. Temuan penelitian dijelaskan di bawah ini tergantung pada topik penelitian dan masalah yang diteliti. Berikut paparan hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di kabupaten dinas sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pemberdayaan menyatakan bahwa :

Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Labuhanbatu Utara mengikuti serangkaian prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk memastikan bantuan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Pendataan calon penerima BST dilakukan melalui Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. BDT ini merupakan data yang dikumpulkan dari seluruh daerah dan

diupdate secara berkala untuk memastikan keakuratan dan relevansi data. Pendataan ini dilakukan dengan

melibatkan perangkat desa/kelurahan yang lebih memahami kondisi masyarakat setempat. Setelah data calon penerima terkumpul, dilakukan verifikasi untuk memastikan bahwa calon penerima memang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Tim verifikasi, yang terdiri dari petugas sosial dan perangkat daerah, melakukan pengecekan langsung di lapangan. Verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa bantuan tidak salah sasaran dan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan. Setelah proses verifikasi, data yang telah diverifikasi kemudian disahkan oleh pejabat yang berwenang di tingkat kabupaten. Data penerima yang sudah disahkan ini kemudian menjadi dasar untuk penyaluran bantuan.

Pernyataan tersebut menjelaskan peran dan tanggung jawab saya dalam pelaksanaan dan pengendalian distribusi Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sebagai pemimpin di tingkat kabupaten, saya bertanggung jawab mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat, termasuk Dinas Sosial, aparat desa, dan lembaga terkait lainnya. Langkah pertama yang saya ambil adalah memastikan bahwa data penerima manfaat selalu diperbarui dan diverifikasi dengan benar, untuk menjamin bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, saya juga mengawasi langsung proses distribusi bantuan di lapangan, memastikan bahwa bantuan diterima oleh masyarakat tanpa hambatan atau penyalahgunaan. Saya sering melakukan kunjungan lapangan dan berinteraksi dengan penerima bantuan untuk mendapatkan umpan balik mengenai proses penyaluran. Selain itu, saya memastikan bahwa sistem pelaporan dan dokumentasi berjalan dengan baik, di mana setiap kegiatan penyaluran dilaporkan secara terperinci dan diperiksa untuk menghindari ketidaksesuaian atau kecurangan. Terakhir, saya melakukan evaluasi terhadap efektivitas program BST dengan menganalisis data penyaluran dan mendapatkan umpan balik dari penerima manfaat. Evaluasi ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, sehingga program BST dapat berjalan lebih baik di masa mendatang. Dengan menjalankan peran-peran ini, saya berusaha memastikan bahwa pelaksanaan dan pengendalian distribusi BST berjalan sesuai standar yang ditetapkan, transparan, akuntabel, dan benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan.

Untuk meningkatkan pelaksanaan dan distribusi BST di Kabupaten Labuhan Batu Utara, saya berharap agar ada upaya yang lebih besar dalam meningkatkan akurasi data penerima. Data yang akurat sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan

kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan mengurangi risiko penyalahgunaan. Perbaikan infrastruktur distribusi juga sangat diperlukan, terutama di daerah terpencil, untuk memastikan bahwa bantuan dapat disalurkan secara efisien dan tepat waktu. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses distribusi adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa bantuan digunakan dengan tepat. Ini termasuk memperbaiki sistem pelaporan, audit, dan mekanisme umpan balik untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah dengan cepat. Penguatan koordinasi antar pihak terkait, seperti Dinas Sosial, aparat desa, dan lembaga non-pemerintah, juga sangat penting. Koordinasi yang baik dapat memastikan bahwa semua pihak bekerja menuju tujuan yang sama dan mengurangi kemungkinan terjadinya tumpang tindih atau kekurangan dalam penyaluran bantuan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan pelaksanaan dan distribusi BST dapat ditingkatkan, sehingga bantuan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Pembahasan

a. Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Labuhanbatu Utara

Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Labuhanbatu Utara dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Proses ini dimulai dari pendataan calon penerima yang diambil dari Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Setelah data calon penerima terkumpul, tim verifikasi melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan keakuratan data dan kesesuaian dengan kondisi sebenarnya. Distribusi bantuan dilakukan melalui kantor pos atau transfer ke rekening bank penerima untuk memudahkan akses dan mempercepat proses penyaluran.

Tahapan pelaksanaan BST melibatkan beberapa langkah konkret, dimulai dengan pendataan yang diupdate secara berkala. Verifikasi data dilakukan oleh petugas di lapangan dengan pengecekan langsung terhadap kondisi calon penerima. Distribusi bantuan dilakukan sesuai metode yang ditetapkan, seperti melalui kantor pos atau transfer bank, dan diawasi oleh tim pengawas untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Pengawasan ini dilakukan oleh tim pengawas internal dan eksternal, serta melibatkan beberapa lapisan pengawasan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.

Struktur dan mekanisme pengendalian intern yang diterapkan mencakup kebijakan tertulis yang mengatur langkah-langkah verifikasi, audit internal, dan mekanisme pelaporan jika ditemukan penyimpangan. Proses pemantauan dan evaluasi

dilakukan secara berkala melalui laporan dari tim di lapangan serta audit oleh lembaga independen, untuk memastikan bahwa pelaksanaan BST sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan. Kasi 1 berperan dalam koordinasi dengan berbagai pihak terkait, monitoring pelaksanaan di lapangan, serta memastikan distribusi BST berjalan sesuai prosedur. Tantangan yang dihadapi antara lain masalah validitas data penerima, keterbatasan infrastruktur, dan kendala geografis.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, dilakukan pelatihan bagi petugas lapangan dan penggunaan teknologi untuk mempermudah proses verifikasi. Koordinasi antara instansi terkait dilakukan melalui rapat rutin, pembentukan tim koordinasi, dan penggunaan sistem informasi terpadu untuk monitoring. Kasi 2 bertanggung jawab memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan dalam pendistribusian BST, melakukan pengawasan langsung di lapangan, dan mengkoordinasikan evaluasi kinerja. Staf teknis mendukung infrastruktur dan teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan BST, termasuk sistem informasi untuk pendataan dan distribusi bantuan, serta mengatasi tantangan seperti keterbatasan jaringan internet di daerah terpencil dan keterbatasan sumber daya teknis.

Penerima BST umumnya merasa terbantu dengan adanya bantuan ini, meskipun ada keluhan terkait keterlambatan dan jumlah bantuan yang dianggap kurang mencukupi. Mereka menganggap BST efektif dalam membantu kebutuhan dasar dan berharap ada peningkatan jumlah bantuan dan ketepatan waktu distribusi. Penerima juga berharap adanya peningkatan transparansi, perbaikan dalam proses pendataan, dan peningkatan jumlah bantuan agar lebih dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara keseluruhan, pelaksanaan BST di Kabupaten Labuhanbatu Utara melibatkan berbagai pihak dengan peran dan tanggung jawab yang jelas. Meskipun ada beberapa tantangan, upaya peningkatan sistem dan proses terus dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan efektif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Evaluasi dan pemantauan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan BST di wilayah ini.

b. Sistem pengendalian intern Bantuan Sosial di Kabupaten Labuhanbatu Utara

Sistem pengendalian intern Bantuan Sosial di Kabupaten Labuhan Batu Utara dirancang untuk memastikan penyaluran bantuan dilakukan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Sistem ini mencakup beberapa komponen penting, dimulai dengan pengendalian administratif yang melibatkan pembuatan dan penerapan kebijakan serta prosedur yang jelas untuk pengelolaan dan

penyaluran bantuan. Pengawasan yang ketat juga diterapkan, melalui pemantauan rutin dan pengendalian langsung terhadap pelaksanaan program, untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan sesuai dengan ketentuan yang ada dan mencegah penyalahgunaan. Verifikasi data penerima bantuan merupakan langkah krusial dalam sistem ini, di mana data penerima diperiksa dan diperbarui secara berkala untuk memastikan akurasi dan keabsahan. Selain itu, audit internal dan evaluasi berkala dilakukan untuk menilai efektivitas sistem dan kepatuhan terhadap kebijakan, serta mengidentifikasi potensi masalah dan area yang memerlukan perbaikan. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan sistem pengendalian intern dapat berjalan dengan baik, memastikan bahwa bantuan sampai kepada yang berhak dan mengurangi risiko kesalahan atau penyalahgunaan dalam proses penyaluran.

4. KESIMPULAN

Sistem pengendalian intern Bantuan Sosial di Kabupaten Labuhan Batu Utara dirancang untuk memastikan pelaksanaan bantuan dilakukan dengan efektif, akurat, dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dengan mengimplementasikan pengendalian administratif yang ketat, pengawasan rutin, serta verifikasi data penerima secara berkala, sistem ini bertujuan untuk mengurangi risiko kesalahan dan penyalahgunaan dalam penyaluran bantuan. Audit internal dan evaluasi berkala juga berperan penting dalam menilai efektivitas sistem dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Melalui penerapan mekanisme-mekanisme ini, diharapkan bantuan sosial dapat disalurkan dengan tepat sasaran, memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan, dan memastikan integritas program tetap terjaga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan karya ini. Terima kasih kepada pembimbing Ibu Junita Putri Rajana Harahap, SE., M.Si., Ak yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan. Semoga karya ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangsih kecil bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR REFERENSI

Ahmad, Penerima Bantuan Sosial Tunai, di RW6 Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare, 15 Oktober 2022

- Amirullah, Penerima Bantuan Sosial Tunai, wawancara di RW7 kelurahan Ujung Baru Kota Parepare, 15 Oktober 2022
- Aren, Alvin A; Randal J. Elder and Mark S. Beasley (2014). Auditing & Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi, Vol 1, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Atiwarda, Penerima Bantuan Sosial Tunai wawancara, di RW6 Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare, 15 Oktober 2022
- Azhar, Susanto. (2013). Sistem Informasi Akuntansi, Struktural Pengendalian Resiko Pengendalian, Edisi Perdana. Bandung: Lingga Jaya
- Gatra, Sandro. (26 Februari 2019). Kompas.Com.
- Hatmoko, Muhammad Zulvan Dwi (2018). Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Penggunaan Dana Desa pada Desa Sinar Luas Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. Jurnal Online.Universitas Gadjah Mada No 55281 Yogyakarta.
- Hendryadi dan Suryani. (2015). Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam, Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Jakarta: PT Fajar Interpertama Mandiri
- Khotijah, Afidatul Siti, dan Damayanti Irma. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Sistem Akuntansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Semarang. Jurnal Riset Akuntansi, Vol (12) , 190-196.
- Moleong, Lexy J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung.
- Mulyadi. (2016). Sistem Pengendalian Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat
- Mutmainnah Indah Suci, “Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Biaya Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Bara” (Skripsi Sarjana: Jurusan Akuntansi 2019)
- Pengendalian Intern Pemerintah Oleh Inspektorat Di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi. Vol:3 (36:25)
- Rahma, Penerima Bantuan Sosial Tunai, di RW6 Kelurahan Ujung Baru Kota Parepare, 15 Oktober 2022
- Remaja Rosdakarya Offset. 2014. Publishing. RAD. Bandung: Alfabeta
- St. Syahrini, “Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) oleh Kementerian Sosial RI Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Kabupaten Takalar”, Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar,th2021
- St.Syahrini, “Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Oleh Kementerian Sosial RI Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Takalar” (Skripsi Sarjana: Jurusan Ilmu Pemerintahan makassar 2021)

- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Sujarweni, Wiratna.
(2015). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Pustaka
- Suryanti Nurdin , Penerima Bantuan Sosial Tunai, Wawancaradi RW8 Kelurahan Ujung Baru
Kota Parepare, 15 Oktober 2022